

PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN DI SUMATERA BARAT

Vivi Afryani^{1*}, Endrizal Ridwan², Neng Kamarni³
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
[white28lotus@gmail.com^{1*}](mailto:white28lotus@gmail.com)

Manuskrip: Maret -2023; Ditinjau: Maret -2023; Diterima: Maret -2023; Online: April -2023;
Diterbitkan: April-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran serta implikasi kebijakan yang dapat mengurangi pengangguran di Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat. Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah lebih difokuskan untuk kemajuan ekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Sumatera Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending on the unemployment rate and the implications of policies that can reduce unemployment in West Sumatra. The type of research used is quantitative research using panel data regression analysis. The results of the study show that government spending on education and health has no impact on the unemployment rate in the province of West Sumatra. The policy recommendation for the government is that the allocation of government spending is more focused on economic progress, because economic growth can reduce the unemployment rate in the province of West Sumatra.

Keywords: Unemployment, Government Spending, West Sumatra Unemployment

I. PENDAHULUAN

Pengangguran telah menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial dari setiap negara, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan manusia dan ekonomi. Di negara Mesir, Pemerintah negara ini berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan memitigasi dampaknya melalui kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan pengurangan pengangguran (Abouelfarag & Qutb, 2020).

Di negara berkembang seperti Afrika Sub-Sahara, pengeluaran publik merupakan instrumen penting dalam kebijakan sektor publik dalam mengurangi tingkat pengangguran. Disamping itu, pengeluaran publik telah berperan aktif dalam mengurangi tingkat kesenjangan, pembiayaan sosial, penciptaan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti sarana transportasi dan komunikasi, pendidikan dan pelatihan, pertumbuhan barang modal industri, penelitian pembangunan, dan lain sebagainya (Onuoha, Oyeyemi, & Agbede, 2019).

Di Indonesia, jumlah pengangguran semakin meningkat akibat tingginya tingkat migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Penduduk yang melakukan migrasi tersebut tidak memiliki keterampilan yang cukup sebagaimana yang dibutuhkan dunia kerja, hal ini menjadikan banyak penduduk yang menganggur dan menjadi penyebab timbulnya permasalahan kemiskinan (Mardiana *et al*, 2017; Kamarni, 2019; Farida, 2022).

Kurangnya kesempatan kerja juga memperburuk situasi pengangguran di mana beberapa orang yang dapat dipekerjakan, dalam angkatan kerja, dengan kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, mau dan ingin bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam istilah terkait, kekurangan dalam peluang pekerjaan mengarah pada kemalasan yang tidak disengaja dari orang-orang yang bersedia bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan (Onuoha *et al*, 2019).

Banyak faktor yang saling terkait dan terhubung menjadi penyebab masalah pengangguran. Kerumitan ini menjadi kendala masalah pengangguran sangat sulit diatasi baik oleh pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah. Tingginya jumlah pengangguran memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, dikarenakan orang-orang yang tidak bekerja berarti tidak memiliki pendapatan (Yefita *et al*, 2022). Ketiadaan sumber pendapatan menjadikan masyarakat sulit dalam mencukupi kebutuhan mereka, dan akhirnya mengantarkan mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan (Kaharudin, *et al*, 2019).

Di Indonesia, jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka mengalami perkembangan yang beragam dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik tahun 2011-2020 menunjukkan tren meningkat pada penduduk angkatan kerja dan penduduk yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka berada diangka 8,32 juta jiwa atau 7,14% dari penduduk angkatan kerja. Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada diangka 7,05 juta jiwa. Namun, peningkatan jumlah pengangguran kembali terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,63% dari tahun 2019 dan berada diangka 9,77 juta jiwa.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2020 menghitung rata-rata nasional TPT di Indonesia berada di angka 6,03% meningkat 28,04% dari tahun 2019. Sementara itu jika dibandingkan dengan TPT keadaan 2018, TPT 2019 cenderung menurun sebesar 3,01%. Peningkatan pengangguran terbuka di Indonesia merupakan imbas dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Hal ini dikarenakan pembatasan aktifitas masyarakat di masa pandemi yang mengakibatkan aktifitas perekonomian tidak berjalan dengan baik (Kamaruddin *et al*, 2021).

Beberapa provinsi di Indonesia mengalami lonjakan jumlah pengangguran terbuka di tahun 2020, salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka berada di angka 138.459 orang, meningkat menjadi 190.609 orang di tahun 2020, atau naik sebesar 37,66% dari tahun 2019. Padahal jika dilihat, tren dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan penurunan jumlah pengangguran yaitu sebesar 2,27%, yang mana jumlah pengangguran pada tahun 2018 ini sebanyak 141.680 orang. Lonjakan angka pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Barat juga disebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan yang merupakan imbas dari pandemi covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2020, Sumatera Barat berada di posisi ke delapan dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia dengan TPT sebesar 6,88% dari TPAK. Padahal dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019 TPT Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke dua belas yaitu di angka 5,55% dan 5,38% dari TPAK. Persentase ini justru memperlihatkan terjadinya penurunan TPT pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya.

Data BPS Provinsi Sumatera Barat untuk keadaan angkatan kerja semester II per Agustus 2020, TPT Sumatera Barat sebesar 6,88% tersebut didominasi oleh pengangguran yang berasal dari tamatan SMA sebanyak 51.021 orang, SMK sebanyak 32.889 orang dan Universitas sebanyak 40.151 orang. Berdasarkan klasifikasi kelompok umur serta jenis kelamin, pengangguran terbuka di Sumatera Barat rata-rata berusia diantara 20-29 tahun, data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Barat lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan jumlah pengangguran perempuan. Sementara itu angka pengangguran lebih tinggi berada di daerah-daerah perkotaan (BPS, 2020).

Tingginya angka pengangguran terdidik yaitu pengangguran yang merupakan tamatan SLTA keatas (Adrimas, 2012), memerlukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Sumatera Barat terutama dari aspek pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Pada realisasi belanja pendidikan persentase realisasi belanja tertinggi berada pada tahun 2011 dengan rata-rata realisasi 41,50%, namun cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, realisasi belanja kesehatan memiliki tren meningkat dari tahun 2011, persentase tertinggi berada pada tahun 2020 dengan rata-rata realisasi 19,60%. Pengeluaran pemerintah yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan pelayanan dasar pada bidang pendidikan dan kesehatan di Sumatera Barat ini cukup tinggi, namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan tingginya angka pengangguran di Sumatera Barat. Seharusnya pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pelayanan dasar dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang memiliki banyak keahlian dan siap pakai di dunia kerja maupun usaha di Sumatera Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran pengeluaran pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Nepram, Singh, & Jaman (2021) di India menyatakan bahwa semua jenis pengeluaran pemerintah ditemukan positif dan signifikan artinya pengeluaran pemerintah meningkatkan pengangguran di negara berkembang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Abouelfarag & Qutb tahun 2020 bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah tidak dapat mengurangi tingkat pertumbuhan pengangguran di Mesir. Temuan dari penelitian Seitaridis & Koulakiotis (2013) menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kointegrasi antara tingkat pengangguran dengan total pengeluaran umum pemerintah di 15 negara *eurozone*, tingkat pengangguran lebih tinggi disebabkan oleh tekanan politik untuk meningkatkan asuransi pengangguran dan program transfer lainnya.

Namun, Onuoha *et al.* (2019) telah melakukan penelitian di negara-negara Afrika yang mana menunjukkan hasil bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan telah mengurangi tingkat pengangguran, sementara itu pengeluaran untuk kesehatan meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Mardiana, dkk (2017) menemukan bahwa anggaran bidang pendidikan dan anggaran infrastruktur memiliki pengaruh langsung dan tidak berdampak cukup banyak bagi pengangguran, tetapi anggaran bidang kesehatan memberikan pengaruh langsung dan berdampak cukup besar terhadap angka pengangguran di Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan Oladipo (2016) menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan membawa pengurangan tingkat pengangguran di Nigeria, dimana pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek modal mengurangi tingkat pengangguran di Nigeria dari waktu ke waktu.

III. METODE PENELITIAN

Data penelitian yang digunakan terdiri dari seluruh informasi berupa data sekunder yang berhubungan dengan kajian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran di provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 2011 s/d 2020. Penelitian ini menggunakan *pooled data* atau data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dengan data *cross section*.

Data panel dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Data Pengeluaran Pemerintah pada 12 kabupaten dan 9 kota (*cross section*) di Provinsi Sumatera Barat ($i = 19$) secara *time series* selama periode 2011 s/d 2020 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data tingkat pengangguran dan data *variable control* (Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan) diakses dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2011 s/d 2020 ($t=10$), sehingga total observasi menjadi 190 sampel.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan baik secara teoritis maupun empiris melalui pendekatan analisis konseptual dan dengan mengkaji penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan kertas kerja baik secara nasional dan maupun internasional.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Penentuan Model Estimasi

Dalam menentukan model estimasi, *panel data regression* harus melakukan beberapa tahapan dalam penentuan model estimasi yang tepat dan akurat. Tahapan pertama melalui pengolahan data dengan *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua dilakukan pengujian model yang tepat dengan menggunakan pengolahan *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier*. Berikut adalah hasil dari pengolahan data dalam penentuan model estimasi :

a. *Pooled Least Square (PLS)* atau *Common Effect Model (CEM)*

Dari hasil pengolahan data (Tabel 1.), dapat di lihat variabel belanja kesehatan, laju pertumbuhan, dan penduduk miskin berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Namun, pada variabel belanja pendidikan dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1. Hasil Pengolahan *Common Effect Model (CEM)*

Variable	Coefficient	Std.Error	t	P> t
Belanja Kesehatan	-0,0595657	0,0435906	-1,37	0,173
Belanja Pendidikan	0,0677187	0,022255	3,04	0,003
Pendapatan Perkapita	0,0000893	0,0000279	3,2	0,002
Laju Pertumbuhan	-0,0466293	0,0739358	-0,63	0,529
Penduduk Miskin	-0,2109392	0,0695551	-3,03	0,003

Sumber: Pengolahan Stata

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Dari hasil pengolahan data (Tabel 2.), dapat di lihat variabel belanja pendidikan, pendapatan perkapita, dan laju pertumbuhan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan variabel belanja kesehatan dan penduduk miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2. Hasil Pengolahan *Fixed Effect Model (FEM)*

Variable	Coefficient	Std.Error	t	P> t
Belanja Kesehatan	0,0368965	0,0481343	0,77	0,444
Belanja Pendidikan	-0,0023145	0,0253459	-0,09	0,927
Pendapatan Perkapita	-0,0001214	0,0000521	-2,33	0,021
Laju Pertumbuhan	-0,1293967	0,0566511	-2,28	0,024
Penduduk Miskin	0,2181823	0,1646867	1,32	0,187

Sumber: Pengolahan Stata

c. *Random Effect Model (REM)*

Hasil pengolahan data yang terlihat pada Tabel 3, variabel belanja kesehatan, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan, dan penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu variabel belanja pendidikan, berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3. Hasil Pengolahan *Random Effect Model (REM)*

Variable	Coefficient	Std.Error	t	P> t
Belanja Kesehatan	-0,0163773	0,0455349	-0,36	0,719
Belanja Pendidikan	0,0306747	0,0237738	1,29	0,197
Pendapatan Perkapita	-0,0000397	0,0000437	-0,91	0,363
Laju Pertumbuhan	-0,1031735	0,0569372	-1,81	0,070
Penduduk Miskin	-0,0261879	0,1258315	-0,21	0,835

Sumber: Pengolahan Stata

Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam pengolahan data panel adalah melakukan Uji Chow, Uji Langrange Multiplier, dan Uji Hausman. Tujuan melakukan ketiga uji ini adalah untuk menentukan model mana yang terbaik yang akan digunakan sebagai hasil pengolahan data. Berikut adalah hasil dari pengolahan datanya :

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan antara model *Common Effect* (CEM) atau *Fixed Effect* (FEM) menjadi model yang terbaik. Dari data hasil regresi FEM (*Fixed Effect Model*). Uji chow dilihat jika nilai $Prob > F$ memiliki nilai lebih kecil dari alfa (0.05), maka model yang digunakan adalah FEM. Setelah dilakukan pengujian, nilai $Prob > F = 0.0000$, ini menyimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model FEM dibandingkan model CEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian pada metode estimasi dengan menentukan antara model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling sesuai digunakan. Dari hasil Uji Hausman (Memilih model terbaik antara FEM atau REM). Uji hausman dilihat jika nilai $Prob > \chi^2$ memiliki nilai lebih kecil dari alfa (0.05), maka model terbaik yang digunakan adalah FEM. Setelah dilakukan pengujian nilai $Prob > \chi^2 = 0.0019$, angka tersebut lebih kecil dari alfa (0.05). Ini menyimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah FEM dari pada REM.

c. Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji LM dilakukan untuk menentukan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang terbaik digunakan pada model persamaan *panel data regression*. Dari data hasil uji LM (Memilih model terbaik antara CEM dan REM). Uji LM dilihat jika nilai $Prob > \chi^2$ memiliki nilai lebih kecil alfa (0.05), maka model terbaik yang digunakan adalah REM. Setelah dilakukan pengujian nilai $Prob > \chi^2 = 0.0000$, yang mana memiliki nilai lebih kecil dari alfa (0.05). Ini menyimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah REM dari pada CEM.

2. Pengujian Asumsi Klasik dan Kesesuaian Model

Tahapan selanjutnya dalam regresi data panel adalah melakukan Uji asumsi klasik untuk menentukan kesesuaian model yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pada hasil uji normalitas di dapat nilai $Prob > z$ adalah sebesar 0.0000 yang mana kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya tidaknya gejala multikolinearitas dalam suatu model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi (*tolerance value*) atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas $tolerance > 0.10$ dan batas $VIF < 10$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel bebas. Pada hasil uji multikolinearitas, di dapat nilai VIF nya adalah 8.15. Nilai ini memiliki angka yang lebih kecil dari 10, hal ini menandakan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas.

c. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi linier. Dalam menentukan heterokedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji hetero ini adalah pada nilai $\text{prob} > \chi^2$. Jika nilai $\text{prob} > \chi^2 > 0.05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Namun, sebaliknya jika nilai $\text{prob} > \chi^2 < 0.05$, maka dapat disimpulkan terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini didapat nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$. Nilai $\text{prob} > \chi^2 < 0.05$ menandakan bahwasannya terjadi masalah heterokedastisitas pada model.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi dalam model regresi linier harus dilakukan jika datanya merupakan data time series. Hal ini dikarenakan autokorelasi sebenarnya adalah suatu nilai dalam sampel atau pengamatan tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai pengamatan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Pada hasil uji autokorelasi dari penelitian ini didapat nilai $\text{Prob} > F = 0.2158$. Nilai ini lebih besar dari 0.05, artinya model ini bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

e. Hasil *Fixed Effect Model* setelah di Robust

Setelah dilakukan uji asumsi klasik pada hasil penelitian ini. Beberapa dari hasil uji asumsi klasik itu tersebut terdapat kesalahan / gejala, yaitu pada uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Hal ini menyebabkan model yang digunakan tidak dapat diterima sebagai hasil dari penelitian. Dengan terjadinya hal demikian, maka diperlukan sebuah perlakuan untuk mengatasi permasalahan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*). Untuk model FEM, maka diperlukan robust pada model agar permasalahan BLUE dapat diatasi. Hasil pengujian FEM robust pada penelitian ini terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *Fixed Effect Model* setelah di Robust

Variable	Coefficient	Robust Std.Error	t	P> t
Belanja Kesehatan	0,0368965	0,058924	0,63	0,539
Belanja Pendidikan	-0,0023145	0,0269506	-0,09	0,933
Pendapatan Perkapita	-0,0001214	0,0000653	-1,86	0,079
Laju Pertumbuhan	-0,1293967	0,0553676	-2,34	0,031
Penduduk Miskin	0,2181823	0,2277453	0,96	0,351
Constanta	7,912644	2,983002	2,65	0,016

Sumber: Pengolahan Stata

Dari hasil pengolahan data didapat model panel yang terbaik adalah FEM (*Fixed Effect Model*) dan setelah melakukan robust, maka hasil regresi dapat diinterpretasikan, dengan model sebagai berikut.

$$Y = 7,91 + 0,037BK - 0,0023BP - 0,0001PpK - 0,13LP + 0,22PM$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengangguran Terbuka

BK : Belanja Kesehatan

- BP : Belanja Pemerintah
- PpK : Pengeluaran perKapita
- LP : Laju Pertumbuhan
- PM : Penduduk Miskin

3. Interpretasi Hasil Penelitian

Tahapan regresi data panel selanjutnya adalah interpretasi melalui Uji F, Uji T dan *Adjusted R Square*. Tabel 5. Merupakan hasil pengolahan data dari Uji F, Uji T dan *Adjusted R Square*.

Tabel 5. . Pengolahan data Uji F, Uji T dan *Adjusted R Square*

Fixed-effects (within) regression

R-sq:

within = 0,1071

between = 0,3007

overall = 0,1315

Variable	Coefficient	Robust Std.Error	Prob > F = 0,0043	
			t	P> t
Belanja Kesehatan	0,0368965	0,058924	0,63	0,539
Belanja Pendidikan	-0,0023145	0,0269506	-0,09	0,933
Pendapatan Perkapita	-0,0001214	0,0000653	-1,86	0,079
Laju Pertumbuhan	-0,1293967	0,0553676	-2,34	0,031
Penduduk Miskin	0,2181823	0,2277453	0,96	0,351
Constanta	7,912644	2,983002	2,65	0,016

Sumber: Pengolahan Stata

a. Uji Simultan (F-Stat)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Dapat dilihat pada Tabel 5. nilai Prob > F sebesar 0.0043 yang mana memiliki nilai lebih kecil dari alfa (0.05). Artinya variabel independen secara simultan/keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Parsial (T-Stat)

Uji T bertujuan untuk melihat pengaruh dari tiap-tiap *independent variable* dan *control variable* terhadap *dependent variable*.

Pada variabel Belanja Kesehatan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari nilai P>t (0.539) lebih besar dari alfa (0.05). Semakin tinggi nilai atau angka Belanja Kesehatan, maka semakin tinggi pula nilai atau angka pada Tingkat Pengangguran Terbuka. Kenaikan nilai Belanja Kesehatan sebesar 1, maka akan menyebabkan kenaikan pada nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.0369, begitu juga sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Favour C, Onuoha, Moses Oyeyemi, Agbede (2019) di negara-negara Afrika (Angola, Benin, Botswana, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Guinea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Maroko, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Sudan,

Tanzania, Togo, dan Tunisia), dimana belanja kesehatan meningkatkan pengangguran di negara-negara tersebut.

Pada variabel Belanja Pendidikan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari nilai $P > t$ (0.933) lebih besar dari nilai alfa (0.05). Semakin tinggi nilai atau angka Belanja Pendidikan, maka akan semakin rendah nilai atau angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Kenaikan Belanja Pendidikan sebesar 1, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.0023, begitu juga sebaliknya. Hasil ini masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Favour C, Onuoha, Moses Oyeyemi, Agbede (2019) di negara-negara Afrika Angola, Benin, Botswana, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Guinea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Maroko, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Sudan, Tanzania, Togo, dan Tunisia), dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara-negara tersebut. Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary (2017) juga menemukan hal yang serupa, dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Timur.

Pada variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari nilai $P > t$ (0.079) lebih besar dari alfa (0.05). Semakin tinggi nilai atau angka Pendapatan Perkapita, maka akan semakin rendah nilai atau angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Kenaikan Pendapatan Perkapita sebesar 1, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.0001, begitu juga sebaliknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damodar, Salam Prakash Singh, Samsur Jaman (2021) di India pada daerah bagian Jharkhand, Chhattisgarh dan Uttarakhand, Bihar, Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh, dimana koefisien pendapatan per kapita adalah negatif dan tidak signifikan. Tanda-tanda negatif dari koefisien ini menyiratkan bahwa dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dapat menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Pada variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari nilai $P > t$ (0.031) lebih kecil dari alfa (0.05). Semakin tinggi nilai atau angka Laju Pertumbuhan Ekonomi, maka akan semakin rendah nilai atau angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.1294, begitu juga sebaliknya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nalyda Yola (2015) di Provinsi Jawa Barat, Ni Putu Ambar Pratiwi dan I Gusti Bagus Indrajaya (2019) di Provinsi Bali, dimana pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di kedua provinsi tersebut. Tingkat pengangguran akan menurun jika penyerapan tenaga kerja meningkat.

Pada variabel Penduduk Miskin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari nilai $P > t$ (0.351) lebih besar dari alfa (0.05). Semakin tinggi nilai atau angka Persentase Penduduk Miskin, maka akan semakin tinggi nilai atau angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Kenaikan Penduduk Miskin sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan kenaikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.2181, begitu juga sebaliknya. Penelitian dengan hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary (2017) di Kalimantan Timur, dimana peningkatan terhadap pengangguran terbuka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

c. R-Square

R square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antar 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik. Jika R square bernilai 0.6, berarti 60% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 40% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel independen (komponen error).

Dari data bisa dilihat nilai R-Square within adalah 0.1071. Artinya 11% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya, 89% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel di luar variabel independen (komponen error).

V. PENUTUP HASIL PENELITIAN

1. Simpulan

Relevansi yang dapat disimpulkan terkait hasil empiris dan hipotesis penelitian ini adalah bahwasanya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak memiliki dampak terhadap pengangguran di provinsi Sumatera Barat, sementara itu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap pengangguran.

2. Saran

Kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah alokasi pengeluaran pemerintah lebih baik difokuskan untuk kemajuan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomilah yang dapat menurunkan tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abouelfarag, H. A., & Qutb, R. (2020). Does Government Expenditure Reduce Unemployment in Egypt? *Journal of Economics and Administrative Sciences*, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2020-0011>.
- Adrimas. (2012). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Teori, Pelaksanaan dan Permasalahan*. Padang: Andalas University Press.
- Althofia, N. Y. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Barat Tahun 2012. *Jurnal Aplikasi Statistika dan Komputasi Statistik*, Volume 7, Nomor 1.
- BPS. (2020). *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia . *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191-205. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.525>
- Febria, A. ., Ibrahim, A. ., & Kamarni, N. . (2022). Faktor yang mempengaruhi neet pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 591-602. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/22935>
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & O.Niode, A. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 19 No.04.
- Kamarni, N., Anshori, M., Sukmana, R. (2019). Poverty Alleviation Through Social Capital in Coastal Areas: Pariaman Coastal Case. *Journal of Innovation in Business and Economics*. Vol. 3 No. 01.

- Kamaruddin, Karimi, S., & Ridwan, E. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi Gayo. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 13 No. 03.
- Mardiana, Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. *INOVASI*, Volume 13 (1), 50-60.
- Nepram, D., Singh, S. P., & Jaman, S. (2021). The Effect of Government Expenditure on Unemployment in India: A State Level Analysis. *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 8 No 3, 0763-0769.
- Onuoha, F. C., Oyeyemi, M., & Agbede. (2019). Impact of Disagregated Public Expenditure on Unemployment Rate of Selected African Countries : A Panel Dynamic Analysis. *Journal of Economics, Management and Trade*, 24(5): 1-14.
- Pratiwi, N. P., & Indrajaya, I. G. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi* , Vol.24 No.2.